

STUDI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM MODERAT DALAM MENCEGAH ANCAMAN RADIKALISME

Mohamad Adlan Alfi¹ Ali Ahmad Yenuri² Moch. Bachrurrosyadi Amrulloh³

¹²³Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

alfie.adlane@gmail.com¹ aliyenuri@unkafa.ac.id²

rosyady.edu@gmail.com³

Abstrak

Ancaman radikalisme berbasis agama menjadi isu krusial yang mengancam stabilitas sosial dan keutuhan bangsa. Pemahaman agama yang literal, eksklusif, dan dekontekstualisasi merupakan akar utama yang menjustifikasi kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana Pendidikan Islam Moderat (*Wasatiyyat al-Islam*) diimplementasikan dalam lembaga pendidikan (sekolah dan pesantren) dan menganalisis peran strategisnya sebagai benteng preventif radikalisme. Nilai-nilai kunci yang ditekankan adalah toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan kewarganegaraan (*muwatanah*). Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif-deskriptif dengan menggabungkan tinjauan kebijakan pendidikan, kurikulum PAI, dan hasil studi kasus implementasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi PIM efektif melalui tiga pilar: integrasi nilai moderasi dalam kurikulum, metodologi pengajaran kritis-dialogis, dan pembentukan tradisi/iklim sekolah inklusif. Melalui strategi ini, lembaga pendidikan mampu menciptakan generasi yang memiliki literasi keagamaan yang matang, kritis terhadap narasi ekstremis, serta berkomitmen kuat terhadap ideologi Pancasila, sebagaimana dicontohkan oleh praktik Ahlussunnah wal Jamaah di pesantren-pesantren NU.

Kata Kunci : Pendidikan Islam Moderat; Radikalisme; *Wasatiyyat al-Islam*; Moderasi Beragama; Pendidikan Islam; Pencegahan Radikalisme

Abstract

The threat of religion-based radicalism has become a critical issue that endangers social stability and national unity. Literal, exclusive, and decontextualized religious interpretations constitute the main roots that justify acts of violence. This study aims to examine in depth how Moderate Islamic Education (*Wasatiyyat al-Islam*) is implemented in educational institutions, particularly schools and Islamic boarding schools (*pesantren*), and to analyze its strategic role as a preventive safeguard against radicalism. The core values emphasized include tolerance (*tasamuh*), balance (*tawazun*), justice (*i'tidal*), and citizenship (*muwatanah*). This research employs a qualitative-descriptive literature study by integrating analyses of educational policies, Islamic education curricula, and findings from case studies of field implementation. The results indicate that the implementation of Moderate Islamic Education is effective through three main pillars: the integration of moderation values into the curriculum, the application of critical-dialogical teaching methodologies, and the development of inclusive school cultures and traditions. Through these strategies, educational institutions are able to cultivate a generation with mature religious literacy, critical awareness of extremist narratives, and a strong commitment to the Pancasila ideology, as exemplified by the practices of *Ahlussunnah*

wal Jamaah in Nahdlatul Ulama (NU) pesantren.

Keywords : Moderate Islamic Education; Radicalism Prevention; Wasatiyyat al-Islam; Religious Moderation; Islamic Education; Pancasila Values

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjunjung tinggi prinsip keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) yang terintegrasi dalam ideologi Pancasila. Karakteristik keagamaan di Indonesia secara historis cenderung inklusif, toleran, dan seimbang (Wasatiyyah Islam) .¹ Namun, dalam dua dekade terakhir, munculnya gerakan-gerakan ekstremisme dan radikalisme telah menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan stabilitas nasional. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena telah menyusup ke ranah pendidikan, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi² .

Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ideologi bangsa dan pusat penyemaian nilai-nilai moderat, justru disinyalir menjadi lahan subur penyebaran paham eksklusif. Data menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan siswa dan mahasiswa untuk bersikap intoleran, bahkan mendukung penggantian dasar negara³. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga terinternalisasi melalui konten kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak terkontrol (seperti Rohis yang disusupi), hingga pandangan personal guru agama (PAI) yang intoleran⁴ .

Oleh karena itu, implementasi Pendidikan Islam Moderat (PIM) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. PIM bertujuan untuk menanamkan pemahaman agama yang utuh, kontekstual, dan humanis, sehingga peserta didik mampu menyeimbangkan dimensi spiritual dan sosial mereka, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Juknis Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kementerian Agama, hlm. 5.

² PPIM UIN Jakarta. (2020). *Ancaman Radikalisme di Sekolah: Temuan dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 2.

³ LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian). (2011). *Survei tentang Sikap dan Pandangan Pelajar Terhadap Pancasila dan Radikalisme*, hlm. 10.

⁴ Annisaa, Q. (2022). *Strategi Pembelajaran Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Siswa*. Buana Ilmu, 7

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Islam Wasatiyyah (Moderasi Beragama)

Islam Moderat, atau yang dikenal dengan konsep *Wasatiyyah Islam*, adalah pemahaman keagamaan yang mengedepankan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), dan kelurusan (*istiqamah*)⁵. Konsep ini menekankan jalan tengah, menjauhi sikap ekstrem dalam beragama, baik ekstrem kanan (radikalisme) maupun ekstrem kiri (liberalisme tanpa batas).

Empat Pilar Utama Wasatiyyah Islam yang harus diinternalisasikan dalam pendidikan:

1. ***Tawasuth* (Moderat/Tengah):** Bersikap tidak berlebihan dalam segala hal, mengambil posisi seimbang antara rasionalitas dan tekstualitas.
2. ***Tawazun* (Keseimbangan):** Menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi (*duniawiyah*) dan ukhrawi (*ukhrawiyah*), serta keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi (*turats*) dan keterbukaan terhadap modernitas (*tajdid*).
3. ***Tasamuh* (Toleransi):** Menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan antarumat beragama, baik dalam aspek ubudiyah maupun muamalah.
4. ***I'tidal* (Keadilan):** Bersikap lurus dan adil dalam bersaksi dan bertindak, bahkan terhadap diri sendiri atau kelompok yang tidak disukai.

B. Definisi dan Karakteristik Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

Radikalisme dalam konteks agama adalah paham atau ideologi yang cenderung menggunakan cara-cara ekstrem untuk mencapai tujuan perubahan yang dianggap fundamental

⁶. Di lingkungan pendidikan, ancaman radikalisme seringkali termanifestasi dalam bentuk:

1. **Intoleransi:** Penolakan atau penghinaan terhadap praktik ibadah, keyakinan, atau keberadaan kelompok lain, termasuk sesama Muslim yang berbeda mazhab.
2. **Eksklusivisme:** Merasa diri atau kelompoknya paling benar (*truth claim* monolitik) dan menganggap kelompok lain sesat atau kafir.
3. **Anti-Pancasila/NKRI:** Penolakan terhadap dasar negara dan upaya menggantinya dengan sistem khilafah atau negara Islam versi tertentu⁷.
4. **Dukungan terhadap Kekerasan:** Pembeneran terhadap aksi terorisme atau kekerasan

⁵ Maksum, H., & Albab, A. F. (2025). *Moderate Islamic Education Curriculum in Qur'anic Perspective*. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 4(1), 595

⁶ Almohammad, A. (2018). *From Total Islam to the Islamic State*. *Journal for Deradicalization*, (15), 5.

⁷ Habibie, M. L. H., et al. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia*. *Jurnal Islamic Education Studies*, hlm. 4.

fisik sebagai metode perjuangan agama.

Penyebaran paham ini umumnya terjadi di luar jam pelajaran formal, melalui kajian kelompok kecil (halaqah), literatur keagamaan yang tidak terawasi, serta melalui media sosial.

Urgensi Pendidikan Islam Moderat

Indonesia didirikan di atas konsensus kebangsaan yang menghargai keragaman. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama. Pendidikan Islam Moderat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan. PIM memastikan bahwa pemahaman Islam selaras dengan semangat nasionalisme dan pluralisme, sehingga generasi muda tidak terjebak dalam dikotomi antara menjadi Muslim yang taat dan menjadi warga negara yang baik ⁸.

Urgensi PIM terletak pada kemampuannya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga memiliki kedewasaan sosial (*social maturity*), yang mampu melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman ⁹. Hal ini sangat penting mengingat polarisasi sosial dan politik seringkali dipicu oleh isu-isu keagamaan.

Strategi Implementasi I: Kurikulum dan Materi Pembelajaran

A. Inseri (Penyisipan) Nilai Moderasi dalam Kurikulum PAI

Strategi utama implementasi PIM adalah melalui penyisipan (inseri) nilai-nilai Wasatiyyah ke dalam seluruh materi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan mata kuliah keagamaan ¹⁰. Inseri ini tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi harus mengubah paradigma pengajaran:

1. **Fiqh Muamalah:** Menekankan bahwa aspek *muamalah* (interaksi sosial) bersifat fleksibel, kontekstual, dan menghargai kearifan lokal (urf) dibandingkan menekankan pada aspek ritual yang kaku.
2. **Sejarah Kebudayaan Islam (SKI):** Mengajarkan sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya peran Wali Songo dan ulama-ulama tradisional, yang menggunakan pendekatan akulturasi, bukan konfrontasi.
3. **Aqidah dan Akhlak:** Mengajarkan konsep tauhid yang inklusif, menekankan *akhlakul*

⁸ Hasan, A. (2021). *Moderasi Pendidikan Islam di Indonesia*. E-Journal Jakarta Islamic University, 3(1), hlm. 8

⁹ Prasetyo, D. E., & Huda, M. A. N. (2022). *The Urgency of Teaching Religious Moderation in Islamic Cultural History Lessons*. Jurnal Pendidikan Islam, hlm. 15

¹⁰ Kementerian Agama (2019), *op.cit.*, hlm. 7.

karimah (moral mulia) sebagai esensi agama, seperti anti-kekerasan, kasih sayang, dan keadilan universal.

B. Pengawasan dan Reviu Konten Buku Ajar

Buku ajar PAI seringkali menjadi pintu masuk penyebaran paham radikal karena memuat narasi yang mendorong intoleransi ¹¹. Langkah strategis yang harus diambil meliputi:

1. **Pembentukan Lembaga Pentashih Buku Nasional:** Pemerintah (Kementerian Agama dan Kemendikbudristek) perlu membentuk tim khusus untuk mereviu, menashih, dan menyertifikasi semua buku ajar PAI dan materi keagamaan agar bebas dari konten radikal, eksklusif, dan intoleran.
2. **Integrasi Lintas Mata Pelajaran:** Nilai-nilai moderasi (toleransi, gotong royong) juga harus diintegrasikan ke mata pelajaran umum, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Sejarah, dan Bahasa.

Strategi Implementasi II: Lingkungan dan Budaya Sekolah

A. Optimalisasi Habitulasi dan Budaya Madrasah/Sekolah

Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Internalisasi PIM paling efektif terjadi melalui pembiasaan (*habitulasi*) dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif ¹². Upaya ini mencakup:

1. **Visi dan Misi Berorientasi Moderasi:** Memasukkan secara eksplisit nilai-nilai moderasi beragama, kemanusiaan, dan kerukunan sebagai bagian integral dari visi, misi, dan tata tertib sekolah/kampus.
2. **Perayaan Hari Besar Agama Lintas Iman:** Sekolah/kampus mengadakan kegiatan yang memfasilitasi keragaman di mana siswa/mahasiswa dilibatkan dalam inisiatif sosial dan kemanusiaan dengan berbagai latar belakang agama. Contohnya: bakti sosial bersama, atau dialog lintas iman berkala.

B. Pengawasan Kegiatan Ekstrakurikuler

Organisasi ekstrakurikuler siswa (OSIS) dan khususnya kelompok keagamaan seperti Rohis dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) seringkali menjadi target utama rekrutmen paham radikal ¹³. Strategi pengawasan meliputi:

1. **Kurasi Pembina:** Memastikan pembina ekskul keagamaan adalah guru atau dosen yang

¹¹ PPIM UIN Jakarta (2020), *op.cit.*, hlm. 3

¹² Abror, M. (2020). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 140

¹³ WGCW (2025), *op.cit.*, hlm. 8.

memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman Islam Wasatiyyah yang kuat.

2. **Materi Terbuka:** Mewajibkan semua materi kajian atau pertemuan ekskul diserahkan dan diverifikasi oleh pihak sekolah/kampus secara berkala.
3. **Pelatihan Wawasan Kebangsaan:** Mengadakan pelatihan dan diskusi rutin bagi pengurus OSIS/UKM tentang Pancasila, NKRI, dan nilai-nilai multikulturalisme.

Studi Kasus Implementasi (Madrasah & Perguruan Tinggi)

A. Model Keberhasilan di Madrasah dan Pesantren

Madrasah, terutama yang berafiliasi dengan organisasi Islam moderat tradisional (seperti NU atau Muhammadiyah), seringkali dipandang relatif berhasil menanamkan Islam yang moderat¹⁴. Model implementasi mereka mencakup:

1. **Kajian Kitab Kuning Berkonteks:** Pesantren mengintegrasikan kajian kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) yang membahas keragaman pandangan (*ikhtilaf*) dan mengutamakan moralitas (tasawuf/akhlak) daripada fikih politik yang sempit.
2. **Pendidikan Berbasis Multikultural:** Sekolah seperti SMA Plus Darussalam Ciamis mengimplementasikan nilai *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *tawasuth* (moderat) melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerimaan perbedaan.

B. Strategi Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi

Di perguruan tinggi, tantangannya lebih kompleks karena mahasiswa dianggap dewasa dan memiliki hak otonomi berorganisasi. Strategi yang relevan meliputi:

1. **Penguatan Mata Kuliah Wajib:** Memperkuat mata kuliah umum (MKDU) seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan dengan menekankan narasi keagamaan yang inklusif dan integrasi ilmu.
2. **Forum Diskusi Lintas Iman:** Kampus harus memfasilitasi ruang dialog terbuka (*open discussion*) dan diskusi lintas agama secara berkala, sehingga mahasiswa tidak hanya mendengar narasi yang tertutup dan monolitik¹⁵
3. **Pelatihan Dosen:** Peningkatan kapasitas dosen, terutama dosen PAI/Agama, agar mampu membedah dan mengonter narasi radikal yang beredar di kalangan mahasiswa.

¹⁴ Habibie, M. L. H., et al. (2021), *op.cit.*, hlm. 9

¹⁵ WGCW (2025), *op.cit.*, hlm. 11

Peran Guru dan Tenaga Kependidikan

A. Guru PAI sebagai *Role Model* Moderasi

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan dosen keagamaan adalah garda terdepan dalam implementasi PIM. Keberhasilan moderasi sangat bergantung pada pribadi pendidik itu sendiri¹⁶. Guru yang moderat harus memiliki:

1. **Akhlak Mulia (*Akhlakul Karimah*):** Mampu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Wasatiyyah (anti-kekerasan, adil, toleran).
2. **Wawasan Kebangsaan:** Memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara komprehensif, tidak hanya sebagai mata pelajaran formal.
3. **Kompetensi Pedagogik Moderat:** Mampu menyam-PAI-kan materi keagamaan dengan pendekatan yang inklusif, sensitif terhadap keragaman, dan menggunakan metode yang dialogis, bukan doktriner.

B. Peningkatan Kompetensi Guru dan Dosen

Untuk memastikan guru dan dosen berperan optimal, diperlukan upaya peningkatan kapasitas secara sistematis:

1. **Pelatihan Berkelanjutan:** Mengadakan pelatihan berjenjang, berkelanjutan, dan berkualitas mengenai moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan pencegahan radikalisme untuk semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru PAI.
2. **Integrasi Kurikulum Pelatihan:** Kurikulum pelatihan harus mencakup materi tentang deteksi dini penyebaran radikalisme, analisis konten media sosial, dan teknik kontra-narasi berbasis ajaran Islam yang moderat.
3. **Dukungan Kelembagaan:** Pemerintah melalui Balai Diklat Keagamaan dan institusi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus menjadi motor penggerak utama dalam pencetakan calon guru yang berwawasan moderasi.

Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun urgensi PIM sangat jelas, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

A. Tantangan Internal (Lingkungan Pendidikan)

¹⁶ Annisaa, Q. (2022), *op.cit.*, hlm. 135.

1. **Resistensi Guru/Dosen:** Sebagian pendidik, terutama yang terpapar paham eksklusif, mungkin menunjukkan resistensi terhadap kebijakan moderasi. Mereka dapat menyetujui materi ajar yang intoleran atau menyebarkan pandangan sempit di luar kelas ¹⁷.
2. **Dualisme Pendidikan:** Adanya pemisahan atau dikotomi yang masih kuat antara pendidikan umum dan pendidikan agama, di mana pendidikan agama terkadang dianggap lebih tradisional dan dogmatis, membatasi potensi humanis siswa ¹⁸.
3. **Keterbatasan Literasi Keagamaan:** Baik siswa maupun sebagian guru, memiliki pemahaman agama yang dangkal dan monolitik, sehingga mudah menerima doktrinasi radikal karena kurangnya kemampuan menganalisis teks keagamaan secara kontekstual.

B. Tantangan Eksternal (Ekosistem Sosial dan Digital)

1. **Penetrasi Media Sosial dan Teknologi:** Kelompok radikal saat ini memanfaatkan media sosial dan aplikasi perpesanan (WA, Telegram) sebagai sarana rekrutmen dan penyebaran ideologi yang sangat efektif. Informasi yang tersebar cepat dan luput dari pengawasan sekolah¹⁹.
2. **Gerakan Dakwah Transnasional:** Pengaruh gerakan Islam transnasional yang membawa ideologi politik keagamaan tertentu (seperti Khilafah) yang mendominasi kelompok kajian di kampus dan sekolah, mempersempit cara berpikir anggota baru.
3. **Faktor Sosial dan Ekonomi:** Kerentanan sosial-ekonomi dan pencarian identitas pada masa remaja/mahasiswa dapat menjadi faktor pendorong seseorang tertarik pada ideologi radikal yang menawarkan solusi instan dan kepastian moral yang semu.

KESIMPULAN

Studi implementasi Pendidikan Islam Moderat (PIM) dalam mencegah ancaman radikalisme menunjukkan bahwa PIM merupakan instrumen krusial dan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa. Implementasi yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif, mencakup aspek kurikuler (insersi nilai Wasatiyyah, revidi buku ajar), kokurikuler/ekstrakurikuler (pengawasan dan penguatan organisasi), dan budaya sekolah (habituaasi dan dialog lintas iman). Aktor kunci, terutama Guru PAI, harus bertransformasi menjadi *role model* yang memiliki kompetensi moderat dan wawasan kebangsaan yang utuh.

¹⁷ PPIM UIN Jakarta (2020), *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁸ Hasan, A. (2021), *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁹ Luthfi, M. (2020), *op.cit.*, hlm. 12.

Meskipun menghadapi tantangan berat dari penetrasi ideologi transnasional dan media sosial, dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, PIM dapat berfungsi secara optimal sebagai vaksin ideologi untuk melahirkan generasi Muslim Indonesia yang inklusif, toleran, dan cinta damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Almohammad, A. (2018). From Total Islam to the Islamic State: Radicalization Leading to Violence Dynamics as a Subject of Reciprocal Affordance Opportunities. *Journal for Deradicalization*, (15), 1–42.
- Annisaa, Q. (2022). Strategi Pembelajaran Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Siswa. *Buana Ilmu*, 7(1), 128–143.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2018). *Survei Nasional Mengenai Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*. Jakarta: BNPT.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Islamic Education Studies*.
- Hasan, A. (2021). Moderasi Pendidikan Islam di Indonesia. *E-Journal Jakarta Islamic University*, 3(1), 1-12.
- Kementerian Agama (2019). *Langkah Strategis Pengarusutamaan Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Juknis Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.
- LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian). (2011). *Survei tentang Sikap dan Pandangan Pelajar Terhadap Pancasila dan Radikalisme*. Jakarta: LaKIP.
- Luthfi, M. (2020). The Islamic Moderation And The Prevention Of Radicalism And Religious Extremism In Indonesia. *Jurnal Dialog*, 43(2), 1-15.
- Maksum, H., & Albab, A. F. (2025). Moderate Islamic Education Curriculum in Qur'anic Perspective. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 4(1), 594-599.
- PPIM UIN Jakarta. (2020). *Ancaman Radikalisme di Sekolah: Temuan dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah.
- Prasetio, D. E., & Huda, M. A. N. (2022). The Urgency of Teaching Religious Moderation in Islamic Cultural History Lessons at MTs Yaspira Ngambon Bojonegoro East Java. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- WGWC. (2025). *Menguak Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Kampus: Rekrutmen, Faktor Pendorong, dan Upaya Pencegahan*. *Jurnal Women and CVE*.